



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 Maret 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.20 WIB s.d 14.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Mengenai Permasalahan Pengelolaan Jalan Tol; 2. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos., M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: .... dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol dan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR hari ini adalah Membahas Mengenai Permasalahan Pengelolaan Jalan Tol dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Kepala BPJT Kementerian PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar dalam pengusahaan Jalan Tol harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan.
2. Komisi V DPR RI meminta BPJT untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengevaluasi *roadmap* pembangunan jalan tol sesuai dengan kebutuhan wilayah dan melakukan studi kelayakan penetapan jaringan jalan tol yang komprehensif;
  - b. meningkatkan pengawasan pada pembangunan konstruksi Jalan Tol dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - c. melakukan evaluasi pada persyaratan dan penilaian peserta lelang dan stakeholder terkait lainnya dalam pembangunan jalan tol;
  - d. mempercepat penyelesaian peraturan sebagai payung hukum rencana implementasi teknologi transaksi tol nontunai nirsentuh (MLFF) di Jalan Tol.
3. Komisi V DPR RI meminta BPJT untuk menindaklanjuti rekomendasi atas kajian KPK terhadap tata kelola penyelenggaraan jalan tol yang meliputi sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan terhadap kewajiban badan usaha, indikasi konflik kepentingan, serta mekanisme pasca-pelimpahan hak konsesi, sehingga tidak menyebabkan kerugian negara.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 28 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL  
KEMENTERIAN PUPR



DANANG PARIKESIT

KETUA RAPAT,



L A S A R U S